

# POLITIK PENDIDIKAN ISLAM PAKU BUWANA X

Oleh: Hermanu Joebagio\*

## Abstract

*The kratons of Java were at times themselves leading agents of Islamisation. Sultan Agung's the great kings of Mataram dynastic has been reputation as reconciler of courtly culture and Islamic piety. Islamisation in Java has been stagnancy after the death of Sultan Agung, and continued centuries later by kings of Kasunanan, that is Sunan Paku Buwana (PB) II, PB IV, PB VI, and PB X. This articles tries to analyze Islamic education politics in the reign of Sunan PB X. The background of Sunan's political thinking was to restored the power that has been disappeared by penetration of Dutch colonial. The strategy to restored the power that is built Islamic School in 1905, named Madrasah Mambaul Ulum. This madrasah consists of elementary school level (ibtidaiyah), secondary school level (tsanawiyah), and senior high school level (aliyah). For ibtidaiyah level expanded in seven regencies, i.e. Klaten, Boyolali, Kartosuro, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, and Surakarta. The expanded Ibtidaiyah level has been provoked revivalism and Islam solidarity, this phenomenon was exceptionally beneficial to the Sarekat Islam.*

كان في عهد عاهل سلطان أغوع أصبح قصر الملكي ماتارم مركزا للدعوة الإسلامية خصوصا في جزيرة جاوى وما حولها وتمتع الملك نفوذا كبيرا في تنمية المملكة من كل جوانبها إلى أن توفي لكن بدأ حركة التنمية من جديد في عهد رئاسة فكو بوانا الثاني والرابع ثم السادس والعاشر الذين ساروا على نفس منوال سابقهم سلطان أغوع خصوصا في محاولة جدية ودثوية لتحسين أوضاع المجتمع. لذلك استهدف البحث إلى معرفة سياسة فكو بوانا العاشر لتحسين أوضاع التربية الإسلامية. وانطلاقا من خلفية تربية فاكو بوانا العاشر والضغط السياسي من قبل حكومة الهولندي المستعمرة استطاع المالك تشكيل سياسة التربية الجديدة لمعارضة حكومة الهولندي وذلك بتأسيس المدارس في أرجاء المملكة من بينها مدرسة منبع العلوم سنة ١٩٠٥ في منطقة سوراكرتا وغيرها ، وسياسة الملك الجديدة التي كانت طبيعتها تعارض حكومة الهولندي مدعومة من قبل الهيئة شركة إسلام .

*Kata kunci: Islam, madrasah, Paku Buwana X, politik, dan Sarekat Islam.*

\* Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UNS

### A. Pendahuluan

Kerajaan Mataram Islam sepeninggal Sultan Agung mengalami berbagai kemerosotan politik, sebagai akibat *tingkah* berbagai intrik di lingkungan keluarga kraton. Kenyataan pahit ini kemudian dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah kesatuan Mataram. Pergolakan para elit politik sepeninggal Sultan Agung secara umum telah mengabaikan pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam secara bermakna di masyarakat.

Pada masa pemerintahan Paku Buwana (PB) III muncul gerakan oposisi dipimpin Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said yang intinya menentang eksistensi kekuasaan Sunan. Gerakan oposisi ini dianggap mengganggu stabilitas politik Hindia Belanda, sehingga cara penyelesaiannya adalah pembagian daerah kekuasaan yang diwujudkan melalui perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang meliputi Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Mangkunegaran Surakarta. Langkah Belanda, kelak ditiru pemerintah Inggris di Hindia Belanda yang juga menetapkan kebijakan membagi Kasultanan Yogyakarta menjadi dua daerah kekuasaan untuk diberikan kepada Pangeran Natakusuma, sebagai Raja PA (Paku Alam) I. Dalam perspektif historis, ketiga figur adalah tokoh oposisi yang dimanfaatkan Belanda untuk memicu kemerosotan politik di Mataram<sup>1</sup>. Sudah menjadi fenomena umum dalam kehidupan para elit politik bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah diikuti dengan penciptaan skenario yang menimbulkan intrik di kalangan keluarga yang akhirnya harus mencari dukungan kepada kompeni untuk tampil sebagai pemenang dalam konflik politik tersebut.<sup>2</sup>

Gerakan pembebasan yang dilakukan PB IV untuk menyatukan kembali wilayah Mataram, memperoleh peluang emas saat meletusnya Perang Diponegoro. Dapat dikatakan simpati PB VI pada gerakan politik Pangeran Diponegoro adalah sebuah ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan politik Belanda yang tidak adil terhadap pemerintah tradisional. Gerakan pembebasan selalu menggunakan simbol agama untuk mempercepat proses penggalangan kekuatan, tapi pada sisi lain kemerosotan politik membawa akibat ketidakseimbangan antar perubahan struktural dan kultural dalam masyarakat. Gambaran ini dapat diamati bahwa sepeninggal Sultan Agung proses Islamisasi mengalami kemandegan, sebagian besar raja-raja pewaris kerajaan tidak meneruskan proses Islamisasi ini bahkan cenderung mengabaikan dan mematikkannya<sup>3</sup>.

Agama Islam hanya dipandang sebagai kendaraan politik dalam menghadapi

<sup>1</sup> Vincent J.H. Houben (2002), "Kraton and Kumpeni Surakarta and Yogyakarta 1830-1870" dalam *Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, Yogyakarta: Benteng Budaya, p. 146..

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Zamakhsyari Dhofier (1982), *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, pp. 8-9, dan Abdurrahman Mas'ud (2004), *Intelektual Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, pp. 65-67.

penguasa kolonial ataupun kekuatan oposisi, tetapi belum dijadikan sebagai suatu ideologi pemberdayaan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai keadilan dan kebajikan (*al 'adl wa al 'ahsan*) belum menjadi dasar kehidupan, yang cukup berkembang dan diterima masyarakat, sehingga kebijakan yang ada berperspektif budaya penindasan (*zulm*) dan kufur (*kufir*) yang mulai mapan. *Cultuur procenten* yang dilakukan kaum priyayi dan bupati dalam periode tanam paksa, serta pemberlakuan sistem *apanage* dan *bekel*, telah memicu munculnya perbanditan dalam masyarakat pedesaan. Peristiwa ini merupakan contoh betapa nilai keadilan dan kebajikan dalam masyarakat tradisional mulai tersingkir dari masyarakat.

Kajian awal ini difokuskan untuk menelusuri bagaimana upaya PB X meneruskan Islamisasi melalui jalur pendidikan dan pengajaran pada awal abad XX di Kasunanan Surakarta. Kebijakan ini perlahan-lahan mendorong pertumbuhan organisasi sosial politik yang bernafaskan Islam yang semakin dinamis dalam masyarakat, dan mulai diterimanya pemikiran-pemikiran yang berbau sosialis Islamis di Kasunanan Surakarta.

### B. Kepribadian Sosok Paku Buwana X

PB X terlahir dengan nama Gusti Bendara Raden Mas Sayidin Malikul Kusno, pada Kamis Legi, 29 November 1866, putra PB IX dengan Gusti Raden Ajeng Kustiyah. PB X adalah sosok modernis yang membawa perubahan progresif di dalam masyarakat. Pada usia 17 tahun PB X telah memikirkan banyak hal untuk memajukan kraton. Menurut Asnawi Hadisiswaja berbagai gagasan yang dilontarkan PB X pada masa mudanya, banyak yang berhasil dilaksanakan, beberapa di antaranya adalah:

- (1) Penerimaan anggaran pemerintah kolonial harus dikelola melalui anggaran pendapatan dan pengeluaran dalam sistem administrasi pemerintahan;
- (2) Mendirikan dewan pertimbangan (*rijkeraad*) untuk memberikan pertimbangan kepada raja, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- (3) Mengembangkan pendidikan Islam dan umum untuk anak-anak *abdi dalem* (*wong cilik* yang mengabdikan di kraton) dan *sentana* (bangsawan);
- (4) Mendirikan perbankan yang diberi nama *Bondolumaksa* untuk kepentingan anak-anak *abdi dalem* dan *sentana*;
- (5) Mewujudkan klinik kesehatan rakyat Kridonirmolo dan apotik Pantihusada;
- (6) Membangun taman hiburan bagi rakyat, Sriwedari;
- (7) Memperbaiki jalan dan penerangan untuk meningkatkan akselerasi perekonomian.<sup>4</sup>

Tahta yang diterima PB X sebenarnya kurang menguntungkan, karena aneka perubahan yang tengah terjadi pada dekade akhir abad XIX. Aneka perubahan ini

<sup>4</sup> Asnawi Hadisiswaja (1939), *Soerakarta Adiningrat*, Surakarta: Poesaka Soerakarta dan Islam Raja Solo, pp. 9-15.

antara lain mengenai isu-isu reorganisasi agraria, pendidikan untuk anak *sentana dalem* dan *abdi dalem*, dan tumbuh serta berkembangnya pers pada awal abad XX yang menggugah kesadaran masyarakat tentang citra bangsa dan budaya<sup>5</sup>. Semua ini menjadi sebagian bahan renungan yang memiliki kekuatan untuk melahirkan kembali kebesaran Kasunanan Surakarta. Oleh karena itu, penandatanganan perjanjian politik (*verklaring*) 1893 tetap dilakukan, meskipun dampak yang diterima membuat semakin kecil wilayah kekuasaan politik, ekonomi, dan peradilan pemerintahan pribumi,<sup>6</sup> bahkan raja dapat dipandang sebagai seorang tawanan dalam kratonnya sendiri<sup>7</sup>. Di dalam pemikiran PB X, perjuangan membangun kembali kebesaran dapat dilakukan melalui pengelolaan kekuasaan dan *jihad*, yang hasilnya dapat memberdayakan masyarakat.

Apabila dirujuk pada pemikiran Hassan Hanafi dalam *at-Turats wa at-Tajdid*<sup>8</sup>, perjuangan PB X berhasil menempatkan egonya secara bermakna ketika berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda, tradisi budaya Jawa dan Islam, serta seirama dengan modernisasi yang sedang berkembang waktu itu. Fenomena ini dapat dilihat dari keberhasilannya mewujudkan gagasan pribadi pada masa mudanya, sehingga tindakan transformatif yang dilakukan menyentuh aneka kemaslahatan warga masyarakat.

Terbentuknya kepribadian PB X antara lain dapat dilihat dalam *Serat Wira Iswara*, khususnya bab *Wulang Rajaputra* dan *Wulang Putra*, yang isi ringkasnya adalah: . . . menjadi raja tidak mudah, harus menjadi orang yang utama, artinya berbudi luhur, bijak serta adil, dan teguh dalam jiwa serta kepribadian. Ia harus menyelesaikan semua perkara dan cobaan yang datang dengan sebaik-baiknya. Seorang raja harus berdaya upaya mengusahakan nama baik kerajaan dan pemerintahannya, begitupun nama baik diri sendiri. Untuk itu perlu pula orang beragama, yakni berdalil al Qur'an.<sup>9</sup> . . . perlunya bersahabat dengan sesama, perlunya orang menganut agama sebagai pegangan hidup dan pembuka hati agar terang. Hendaknya dipelajari sastra yang memiliki ajaran-ajaran luhur, dengan mempelajari ajaran-ajaran yang terkandung dalam sastra, orang akan tahu watak nista, madya, dan utama. Berbekal budi pekerti luhur, tak akan terkena godaan iblis. Jauhkan pertentangan, menjadi raja (pejabat tinggi) hendaknya teguh iman, jangan mudah tergoncang oleh bujuk rayu wanita (istri) yang bukan pada tempatnya.<sup>10</sup> Menurut Darsiti Soeratman<sup>11</sup> pendidikan PB X diarahkan pada penguasaan

<sup>5</sup>Benedict Anderson (1987), *Imagine Communities, Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, pp. 15-25.

<sup>6</sup>Darsiti Soeratman, (2000), *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, p. 187.

<sup>7</sup>Kuntowijoyo, (2004), *Raja, Priyayi, dan Kawula*, Yogyakarta: Ombak, p. 19.

<sup>8</sup>Ilham B. Saenong (2002), *Hermeneutika Pembebasan*, Jakarta: Teraju, p. 75

<sup>9</sup>Paku Buwana IX (1979), *Serat Wira Iswara*, Jakarta: Depdikbud, pp. 46-68.

<sup>10</sup>*Ibid.*, pp. 69-105.

<sup>11</sup>Darsiti Soeratman (2000), *op. cit.*, pp. 312.

aneka bidang: kesusasteraan, agama, pengetahuan dan ketrampilan menggunakan besi aji, kuda, kesenian, olah raga, dan pengetahuan kejiwaan, yang dapat membangun kematangan kepribadiannya. Kuntowijoyo melihat bahwa model pendidikan semacam itu hanya dapat mengembangkan intelegensi emosional dan spiritual serta tidak mengembangkan intelegensi intelektualnya<sup>12</sup>. Larson mengutip laporan beberapa residen yang melihat PB X seorang *elusive* (sukar dipahami), membingungkan, pesolek, lemah dalam administrasi pemerintahan, agak bodoh, seorang despot yang disegani, dan berwatak keras yang tidak pernah ragu terhadap tindakannya, tetapi setia kepada raja Belanda.<sup>13</sup>

Paradigma psikologi menyebutkan adanya perbedaan antar intelegensi intelektual dan emosional. Perkembangan intelegensi intelektual dan emosi dapat saja berjalan seirama, tetapi dapat juga sebaliknya, hal ini sangat tergantung pada sejauhmana aspek-aspek spiritual mampu mengendalikan emosi anak<sup>14</sup>. Dalam perspektif historis, keseimbangan intelegensi intelektual, emosional, dan spiritual harus dimiliki seorang politisi. Dalam hubungan model pendidikan PB X telah terjadi keseimbangan antar intelegensi intelektual, emosional, dan spiritual. Apabila tidak terjadi keseimbangan antar ketiga aspek ini akan terjadi ketegangan dengan pemerintah kolonial, dan hal itu dapat mengacaukan gagasan yang sedang dirintisnya.

Fenomena kemampuan intelektual PB X dapat ditelusuri antara lain dari pendapat residen van Wijk, bahwa Sunan bukan seorang yang lemah dari segi administrasi pemerintahan. Sunan membatasi pengeluaran untuk upacara-upacara kerajaan, karena anggaran yang diberikan pemerintah kolonial Belanda terbatas, hanya dua juta gulden per tahun. Andaikan Sunan seorang yang lemah, tidak mungkin rakyat memberinya julukan *wicaksana*. Pengeluaran yang cukup ketat itu dimaksudkan untuk mengembangkan pendidikan, yaitu untuk mendirikan madrasah dan sekolah bagi para anak-anak *sentana* dan *abdi dalem* yang belum tersentuh pendidikan<sup>15</sup>. Putra-putri raja umumnya sudah mendapat pendidikan di sekolah umum Belanda, misalnya *Derde School* di Mesen, *Eerste School* (putra) di Loji Wetan, *Meijes School* (putri), *Frobel School* di Sangkrah, *Gijmnastiek School* di Loji Wetan. Pada jenjang yang lebih tinggi putera-putera raja memasuki *Lagere School*, *Mulo*, *HBS* (*Hoogere Burger School*) di Madiun, *Technische Hoogeschool* di Bandung, *Opleidings School* di Batavia, *Rechts School* di negeri Belanda<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> Kuntowijoyo (2004), *op. cit.*, p. 6.

<sup>13</sup> George D.Larson (1990), "Prelude to Revolution, Palace and Politics in Surakarta, 1912-1942" dalam *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, pp. 43-46.

<sup>14</sup> Sarlito Wirawan Sarwono (2005), "Kecerdasan Emosi Politisi", dalam *Kompas*, Sabtu, 7 Mei, p. 4.

<sup>15</sup> Larson (1990), *op. cit.*, p. 47.

<sup>16</sup> Mangkunegaran (1929), *Narpawandana*, pp. 62-63.

Gubernur Van der Jagt menilai bahwa PB X tampaknya loyal kepada pemerintah, tetapi memiliki naluri untuk mengembangkan kekuasaan, bahkan residen Schneider memberi sinyalemen kepada koleganya untuk berhati-hati terhadap potensi subversif Kraton Kasunanan. Berdasarkan pengamatan Schneider banyak bupati *mancanegara* yang masuk dan keluar kraton untuk menyampaikan laporan tanpa memperhatikan eksistensi kedudukan residen sebagai wakil gubernemen, apalagi ada di antara bupati-bupati itu yang harus bermalam di kota Surakarta<sup>17</sup>.

### *C. Dinamika Madrasah dalam Jaringan Pesantren*

Kraton Kasunanan sejak lama memiliki hubungan khusus dengan pesantren. Model ini merupakan warisan gaya Sultan Agung untuk menunjukkan bahwa kraton sebagai pelopor Islamisasi dan penggagas rekonsiliasi budaya Jawa dan Islam<sup>18</sup>. Hubungan Sultan Agung dengan Pesantren Tembayat dilukiskan sangat erat, dan ketika menghadapi kekalahan dalam penyerbuan ke Batavia, yang diikuti dengan munculnya pemberontakan 1630, mendorong Sultan melakukan ziarah ke Sunan Tembayat untuk memperoleh penyelesaian masalah-masalah kenegaraan melalui *wisaa ananta wisik ing ratu*<sup>19</sup>.

Jaringan kraton dan pesantren yang dibangun Sultan Agung merupakan dukungan legitimasi politis untuk mempertahankan kebesarannya, sedangkan Kraton Kasunanan lebih bersifat kultural edukatif. Pesantren Tegalsari di Ponorogo yang didirikan PB II sebagai ucapan terima kasih kepada Kyai Kasan Besari (1742-1762) atas penyelamatan dalam peristiwa pemberontakan Cina di Kraton Kartasura. Eksistensi pesantren dilanjutkan putra-putranya Kyai Imam Besari I, Kyai Imam Besari II, dan Kyai Yahya, dan selama itu Pesantren Tegalsari telah mendidik beberapa pujangga besar seperti Yasadipura II (1756-1844) dan Raden Ngäbehi Ranggawarsita (1802-1873). Sedangkan Yasadipura I (1729-1803) tidak dididik di Pesantren Tegalsari Ponorogo, tetapi di sebuah pesantren di Kedu di bawah asuhan Kyai Hanggamaya.

Sementara itu keinginan PB IV untuk memperkuat kehidupan keagamaan di Kasunanan antara lain dilakukan dengan mendatangkan Kyai Jamsari dari Banyumas sebagai penasehat keagamaan kraton. Kyai Jamsari dihadiahi sebidang tanah di sebelah barat daya kraton. Di kampung itu Kyai Jamsari diperkenankan mendirikan pesantren, dan dinamakan Pesantren Jamsaren. Saat pecah Perang Diponegoro Pesantren Jamsaren diluluhlantakkan Belanda, karena Kyai Imam Rozi pendiri

<sup>17</sup> Pakne Puri (2004), "PB X, Jaman Pergerakan Rakyat", dalam *Penyebar Semangat*, No. 39, 2004, pp. 7-8, 40.

<sup>18</sup> Merle C. Ricklefs (1998), "Islamising Java: The Long Shadow of Sultan Agung", dalam *Archipel*, Vol. I, No. 56, p. 470.

<sup>19</sup> *Ibid.*, pp. 472-473.

Pesantren Tempursari, Klaten, dikenal sebagai penghubung PB VI dengan Pangeran Diponegoro. Sekitar pertengahan abad XIX Pesantren Jamsaren dihidupkan kembali oleh PB IX untuk mengembangkan pengetahuan esoteris yang semakin surut di lingkungan kraton. Kemudian pimpinan pondok pesantren dipercayakan kepada Kyai Idris, cucu dari Kyai Imam Rozi.<sup>20</sup>

Di dalam *Reglement op het beleid der regeering van Nederlansch-Indie* (sejenis UUD Hindia Belanda) 1855, pasal 124, disebutkan bahwa raja, bupati, dan ulama diberi wewenang untuk mengawasi sekolah-sekolah agama Islam. Pasal ini yang diasumsikan bahwa PB IX dapat menghidupkan kembali Pesantren Jamsaren sepanjang raja dapat melakukan pengawasan terhadap pesantren itu, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal<sup>21</sup>.

Upaya menghidupkan kembali pesantren dilandasi kenyataan bahwa tradisi pemikiran intelektual Jawa abad XVIII – XIX yang berpusat di kraton mengalami kemandekan pada 1866, ketika terjadi perselisihan PB IX dengan Raden Ngabehi Ranggawarsita. Berhentinya tradisi ini seiring dengan tumbuhnya berbagai jenis sekolah sekuler Barat yang memberi tempat kepada anak-anak bangsawan untuk mempelajari aneka pengetahuan modern. Fenomena ini dipandang merendahkan pengetahuan esoteris yang selama ini dimiliki pujangga kraton, kyai, dan ulama<sup>22</sup>. Kecewa ini antara lain dapat dilihat dalam beberapa bait *Serat Kalatida* berikut ini:

*Mangkya darajating praja, kawuryan wus sunya ruri, rurah pengrehing ukara, karana tanpa palupi, ponang paramengkawi, kawileting tyas malatkung kongas kasudranira, tidhem tandhaning dumadi, bardayengrat dening karoban rubeda....*

(Sekarang martabat negara, tampak telah sunyi sepi, sebab rusak pelaksanaan peraturannya, karena tanpa teladan, maka sang pujangga [Ranggawarsita] diliputi oleh kesedihan hati, merasa tampak kehinaannya, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupan).<sup>23</sup>

Surutnya tradisi di atas dan melihat perkembangan keadaan sosial politik Surakarta pada akhir abad XIX dan awal awal XX, muncul pemikiran untuk mempertahankan pengetahuan esoteris melalui jalur pendidikan formal, dengan pertimbangan:

- (1) Tidak mudah mencari pengganti *abdi dalem* ulama yang meninggal dunia baik berada di kraton maupun di kabupaten<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Zamakhsyari Dhofier (1982), *op. cit.*, p. 127.

<sup>21</sup> H. Baudet dan I.J. Brugmans (1987), "Balans van Beleid, Terugblik op de Laatste halve eeuw van Neder-landsch-Indie", dalam *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: YOI., pp. 238-253.

<sup>22</sup> S. Margana (2004), *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial*, Yogyakarta: Pelajar, p. 196.

<sup>23</sup> Karkono Partokusumo (1983), *Zaman Edan: Pembahasan Serat Kalatida Ranggawarsita*, Yogyakarta: Proyek Javanologi, pp. 14-19.

<sup>24</sup> Mangkunegaran (1999), *Pawarti lan Kabar Panprentahan Surakarta*, p. 42.

- (2) Terjadi kemandekan pengetahuan esoteris sejak 1866 dalam kehidupan kraton, dan hal ini tidak menguntungkan bagi pengembangan pemikiran intelektual Jawa yang sudah dilandasi nilai-nilai Islam<sup>25</sup>.
- (3) Dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1893, No. 125, pasal 5, dikemukakan adanya larangan terhadap pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah pribumi baik di dalam maupun di luar kelas;
- (4) Dalam UUD Hindia Belanda 1855, pasal 124, dan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1905, No. 550, pasal 1, dikemukakan bahwa siapa saja yang hendak memberi pengajaran agama Islam diwajibkan memiliki izin tertulis dari bupati atau patih dengan mencantumkan sifat pengajaran tersebut;
- (5) Munculnya kebijakan politik etis mendorong pendidikan pribumi guna mengisi jabatan birokrasi administrasi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda, yang pada puncaknya akan didirikan *Volksraad*, sebagai proto-parlemen kolonial<sup>26</sup>.

Pemikiran para ulama ditampung KRTP Tapsiranom V dan Papatih Dalem KRA Sosrodiningrat untuk disampaikan kepada PB X<sup>27</sup>. Sunan memberi izin untuk mendirikan madrasah dengan nama Mambaul 'Ulum pada tahun 1905. Penyelenggaraan pendidikan di bawah Yayasan Kasunanan. Tempat pendidikan sementara berada di serambi Masjid Agung. Pada 20 Februari 1915 Mambaul 'Ulum menempati gedung baru, baik untuk Madrasah Ibtidaiyah (kelas I-IV), *Wusta* atau Tsanawiyah (kelas V-VIII), dan *Ngulya* atau Aliyah (kelas IX-XI).

Semula Madrasah Mambaul 'Ulum didirikan untuk anak-anak *abdi dalem* ulama, tetapi dalam perjalanannya sangat diminati masyarakat, sehingga Madrasah Ibtidaiyah diperluas dan didirikan di tujuh kabupaten, yaitu; Klaten, Boyolali, Kartosuro, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, dan Surakarta. Kebijakan ini ditempuh untuk memberi kesempatan kepada anak-anak usia sekolah di kabupaten-kabupaten itu agar dapat menikmati pendidikan formal agama. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tsanawiyah dan Aliyah, dipusatkan di Surakarta<sup>28</sup>, dan disediakan asrama di Pondok Pesantren Jamsaren dan Pondok Prasaja<sup>29</sup>.

Kurikulum dan kitab yang dipergunakan masih mengikuti pola pesantren, hanya dalam perkembangannya mengalami perubahan dengan dimasukkan aneka budaya Jawa sebagai muatan lokal kurikulum, misalnya *pinulang Jawa*, *panggula wentah*, dan *jagrapyah*. Kebijakan memasukkan muatan lokal budaya Jawa dilandasi pemikiran

<sup>25</sup> S. Margana (2004), *op. cit.*, pp. 169-199.

<sup>26</sup> C. Lambert Maria Penders (1977), *Indonesia, Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942*, St. Lucia Queensland: University of Queensland Press, p. 61.

<sup>27</sup> A. Basit Adnan (1982), *Sejarah Masjid Agung dan Gamelan Sekaten di Surakarta*, Surakarta: Mardikuntaka, p. 17.

<sup>28</sup> Mangkunegaran (1999), *op. cit.*, p. 43

<sup>29</sup> A. Basit Adnan (1982), *loc. cit.*

bahwa Sunan sebagai pelindung kebudayaan Jawa. Kebijakan ini untuk mempertahankan tradisi budaya Jawa yang masih berlaku dalam masyarakat, baik nilai-nilai religius, nilai-nilai yang berhubungan dengan pandangan hidup seperti terdapat dalam serat, suluk, dan primbon, maupun nilai-nilai yang berhubungan dengan kemegahan, kekuasaan, dan kebesaran Kraton Kasunanan Surakarta.

Muatan lokal budaya Jawa dapat dilihat dalam jadwal pelajaran Madrasah Mambaul 'Ulum yang diberlakukan pada tahun 1933, dan ditemukan di Radya Pustaka Surakarta. Kurikulum ini berlaku untuk jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah<sup>30</sup>. Apabila kurikulum ketiga jenjang itu diamati terdapat unsur perpaduan pengetahuan agama, umum, dan budaya Jawa. Bukti dimasukan muatan lokal dapat dilihat pada mata pelajaran madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah di bawah ini:

### Mata Pelajaran Madrasah Mamba'ul Ulum 1933

Ibtidaiyah	Tsanawiyah	Aliyah
Al Qur'an	Al Qur'an	Tafsir
Fiqih	Fiqih	Musthalah Tafsir
Tauhid	Tauhid	Fiqih
Nahwu	Nahwu	Ushul Fiqih
Saraf	Saraf	Hadits
Tarikh	Tarikh	Musthalah Hadist
Tajwid	Hadits	Tarikh
Lughat	Balaghah	Balaghah
Piwulang Jawa	Piwulang Jawa	Falak
		Mantik
		Piwulang Jawa
		Panggula wentah
		Jagrapyah

Sumber: "Ruster Mambaul 'Ulum", dalam *Bebukanipun Adeging Pamulangan ing Kagungan Dalem Masjid Ageng*, 1932.

Sementara itu, kitab-kitab pelajaran yang dipergunakan adalah kitab-kitab *Fathul Mu'in*, *Fathul Qarib*, *Taqrib Abu Sujak*, *Hadits Bukhari Muslim*, *Tafsir Jalalain*, *Alfiyah Ibn Malik*, tasawwuf, dan sastra Jawa.

Madrasah Mambaul 'Ulum adalah bentuk pendidikan Islam transisional atau proto modern. Masa transisi ini berlangsung hingga dekade ke 3 abad XX, karena pendidikan Islam modern terbuka untuk masyarakat umum baru terjadi sekitar tahun 1950-an. Tapi sebelumnya telah didahului gerakan Muhammadiyah dan Al Irsjad

<sup>30</sup>Radya Pustaka (1905), *Bebukanipun Adeging Pamulangan ing Kagungan dalem Masjid Ageng*, Surakarta: Radya Pustaka.

dalam memperkenalkan pendidikan modern<sup>31</sup>.

Setelah proklamasi pengelolaan Madrasah Mambaul 'Ulum diambilalih pemerintah pusat berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 3/18 Januari 1947. Dikemukakan dalam peraturan tersebut bahwa bangunan masjid dan madrasah di bawah pengelolaan kraton, tapi penyelenggaraan pendidikannya diambilalih pemerintah. Dengan keputusan ini maka berakhir peran Kasunanan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam.

#### D. PB X dan Resonansi Gerakan

Dalam suatu masyarakat paternalistik, seorang tokoh, apalagi raja, adalah sosok panutan dan berbagai tindakannya selalu menjadi bahan rujukan utama masyarakat. Perluasan madrasah di berbagai kabupaten yang dilakukan PB X pada dasarnya merupakan sinyal Islamisasi melalui penyediaan sarana pendidikan formal bagi rakyat, yang bernuansa politis. Hal ini dilandasi situasi sosial politik yang terjadi di Hindia Belanda, yaitu:

- (1) Adanya visi Gubernur Jenderal Idenburg (1909-1916) yang ingin melakukan akselerasi Kristenisasi di Hindia Belanda<sup>32</sup>. Akselerasi itu adalah akibat dari kemenangan Partai Kristen dalam pemilihan umum di Belanda yang membawa konsekuensi logis bagi pejabat yang ditunjuk untuk menyertakan Kristenisasi dalam pelaksanaan kebijakan politik etis. Kristenisasi Idenburg wujud dalam dinamika kelompok misi dan zending yang berdaya upaya mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah yang berafiliasi di bawah naungan lembaga pendidikan Katolik dan Kristen. Pada sektor lain, Idenburg membagi-bagikan kartu yang disebut *pasar en Zondag circulaire*, yaitu edaran yang memerintahkan para pegawai agar menghormati hari Minggu dengan melarang aneka pesta dan kegiatan pasar pada hari itu. Kebijakan ini sebagai strategi untuk menghadapi dinamika Islam di Hindia Belanda<sup>33</sup>.
- (2) Keinginan Pendeta D. Bakker untuk memperoleh tanah untuk mendirikan Sekolah Kristen Pribumi dan rumah sakit di Surakarta pada tahun 1910 ditolak PB X. Hal ini dilandasi bahwa Sunan adalah pemimpin agama Islam sehingga kegiatan penginjilan yang dilakukan lembaga pendidikan itu dapat memicu keresahan sosial di Surakarta. Tapi kuatnya aneka tekanan Gubernur Jenderal Idenburg, Sunan bersikap diam daripada mengabulkan. Sikap menolak dan diam secara politis dimaknai bahwa Sunan tidak senang terhadap tekanan itu<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Nurcholish Madjid (1998), *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, p. 159.

<sup>32</sup> Husnul Aqib Suminto (1986), *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, p. 22.

<sup>33</sup> *Ibid.*, pp. 20-24.

<sup>34</sup> Larson (1990), *op. cit.*, pp. 50-52.

Keadaan politik pada akhir abad XIX dan awal abad XX ditandai dengan geliat gerakan Islam yang meningkat tajam. Sementara beragam radikalisasi dan pemberontakan semakin meluas di beberapa desa di Jawa. Radikalisme diperkuat dengan ideologi Islam yang pada tahap selanjutnya menjadi embrio gerakan kebangsaan. Radikalisme muncul sebagai akibat dari pertautan intensifikasi pengaruh Barat, yaitu penetrasi Barat terhadap birokrasi lokal untuk memperoleh konsesi ekonomi, dan akibat penetrasi itu adalah terjadinya disorganisasi dalam masyarakat tradisional<sup>35</sup>. Gerakan radikal pada umumnya terkonsentrasi di pedesaan karena praktek ekonomi perkebunan berada di kawasan itu, dan pesantren sebagai pemimpin pergerakan yang memiliki basis massa kuat sangat menentang praktek ekonomi kapitalis yang merugikan rakyat<sup>36</sup>.

Memasuki abad XX peta politik pergerakan kebangsaan berubah dari konsentrasi pedesaan ke perkotaan. Hal ini akibat dari munculnya kelompok intelektual yang berpendidikan Barat, dan munculnya organisasi sosial politik yang memiliki tujuan 'Indonesia merdeka' yang didirikan dan dipelopori oleh kelompok intelektual. Menurut Ricklefs dinamika politik dalam sejarah Indonesia tidak hanya dipelopori kaum intelektual berpendidikan Barat, tetapi dipelopori oleh keluarga raja, priyayi *pangreh praja*, priyayi intelektual, dan ulama<sup>37</sup>.

Kehadiran priyayi *pangreh praja* dalam pergerakan kebangsaan adalah sebagai bagian dari naluri *the ruling class* yang kedudukannya mengalami kemunduran, sebagai akibat dari kebijakan politik ekonomi liberal. Para bupati tidak lagi berperan dalam lingkaran proses sewa tanah dan pengerahan tenaga kerja, tetapi menjadi pegawai pemerintah kolonial<sup>38</sup>. Sinyalemen Gubernur Van der Jagt dan residen Schneider tentang potensi kraton untuk memperluas pengaruh politik adalah benar. Banyak pejabat *pangreh praja* dan bupati yang menemui PB X untuk melaporkan keadaan sosial politik di daerahnya.

Laporan bupati dan *pangreh praja* dimanfaatkan PB X untuk melakukan kunjungan 'kerja' di beberapa kota; seperti Semarang, Bogor, Bandung, Lembang, Sukabumi, Malang, Bali, Lombok, dan Surabaya. Tercatat perjalanan ke Salatiga, Ambarawa, Semarang, dan Surabaya pada 1903 dan 1906. Pemerintah memandang bahwa kunjungan itu bernada politis, memberi kesan bahwa Sunan sebagai raja tertinggi di Jawa dan pemimpin agama Islam, sehingga perjalanan kerja itu

<sup>35</sup> Sartono Kartodirdjo (1978), *Protest Movement in Rural Java*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, pp. 210-213.

<sup>36</sup> Takashi Shiraishi (1997), "An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926", trj. Hilmar Farid, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Graffiti Pers.

<sup>37</sup> Merle C. Ricklefs (2002), "Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792", dalam *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*, Yogyakarta: Bentang Budaya, p. 27.

<sup>38</sup> Ong Hok Ham (2002), *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta: Buku Kompas, pp. 8-13.

membahayakan karena akan mendorong geliat gerakan keagamaan<sup>39</sup>.

Kunjungan 'kerja' Sunan ditafsirkan sebagai *political schooling* seorang raja Jawa, dan dalam hubungan dengan *political schooling* tidak harus melalui organisasi sosial politik tetapi dapat saja melalui kegiatan-kegiatan pribadi seorang raja<sup>40</sup>. *Political schooling* Sunan cenderung bersifat *janus face* (bermuka dua), pada satu sisi membangkitkan kesadaran bangsa, rasa kebersamaan, sewilayah dan senasib yang harus dipertanggungjawabkan bersama, namun pada sisi lain ber*locus* politik untuk mempertahankan kebesarannya. Menurut Quraish Shihab apa yang dilakukan Sunan berkaitan antara semangat kebangsaan, fungsi kekhalifahan, dan dorongan untuk membangun diri sendiri maupun secara bersama-sama pada daerah yang dikunjunginya.<sup>41</sup>

Munculnya Sarekat Islam (SI) pada 1912 telah mendapat tempat dan dapat hidup subur di pedesaan Surakarta. SI dengan menggunakan simbol Islam dapat membangkitkan *revivalisme* dan solidaritas Islam, sehingga berimplikasi terhadap tumbuhnya nasionalisme. Dalam perspektif Sunan, organisasi sosial politik modern yang tumbuh di awal abad XX merupakan lahan untuk menegakkan kebesaran Kasunanan, sehingga berdirinya SI tercipta hubungan baik dengan kraton. Hubungan SI-kraton adalah sesuatu yang wajar untuk mencari legitimasi politik guna mempercepat proses *recruiting* massa, dan untuk melawan pegawai-pegawai pemerintah yang banyak dipengaruhi oleh politik kolonial Hindia Belanda. Dalam kongres SI kedua banyak kerabat kraton yang menjadi anggota organisasi ini. Pangeran Hangabehi dipilih sebagai pelindung dan menjadi anggota *central comite*, RM Woerjaningrat sebagai anggota kehormatan, RMA Pespodiningrat sebagai Ketua Pengurus SI Jawa Tengah, dan RM Soerjadiningrat sebagai Ketua SI cabang Solo<sup>42</sup>

Hubungan PB X dan SI dipelopori RM Tirtoadisoerjo<sup>43</sup>, seorang tokoh pendiri Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia pada 1909, dan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor pada 1911. RM Tirtoadisoerjo mendirikan SDI di Surakarta, yang merupakan cabang dari SDI Bogor. Mengingat kesibukannya sebagai ketua SDI di Bogor, maka pimpinan SDI Surakarta digantikan oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik terkemuka daerah Laweyan. Perubahan SDI menjadi SI adalah dilandasi keinginan para elit organisasi ini untuk memberdayakan para pelaku ekonomi pribumi sehingga dapat bersaing dengan pedagang non pribumi (Cina) yang diberi konsesi monopoli perdagangan oleh pemerintah kolonial.

Pada dekade kedua abad XX kraton sebagai pusat budaya Jawa semakin

<sup>39</sup> Larson (1990), *op. cit.*, p. 49.

<sup>40</sup> Nurcholish Madjid (1998), *op. cit.*, p. 80.

<sup>41</sup> Quraish Shihab (2003), *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan, p. 174.

<sup>42</sup> Larson (1990), *op. cit.*, pp. 62-67.

<sup>43</sup> Restu Gunawan, Dwi Ratna Nur Hajarah, dan Tugas Irwahyono (1999), *Sejarah Kerajaan Tradisional Kartasura*, Jakarta: Depdikbud, p. 172.

diperkaya dengan masuknya ideologi sosialis yang dibawa Samuel Koperberg. Menurut van Miert Koperberg datang pada tahun 1918 dan memberi kursus pelajaran ekonomi kepada Prangwedana, Woerjaningrat, dan Sastrowidjono. Koperberg memberi pandangan kepada keluarga kraton tentang aliran sosial-demokrat yang moderat yang dapat memberi tempat bagi berkembangnya nasionalisme Jawa seperti yang diidam-idamkan kalangan keluarga kraton. Kraton Kasunanan diharapkan dapat membangun sinergi antar kekuatan yang dimiliki kaum borjuis dan kaum reaksioner. Hal ini dikemukakan Koperberg karena hampir sebagian besar tokoh nasionalis radikal menentang eksistensi Kasunanan, baik dalam kebijakan maupun diplomasi politik yang dilakukan. Tokoh nasionalis radikal yang dimaksud adalah Tjipto Mangoenkoesoemo dan Haji Misbach, pemimpin organisasi politik Insulinde. Pemikiran Koperberg ditafsirkan bahwa perlu perubahan nuansa kebijakan dan diplomasi politik kraton, sehingga harus menekankan keberpihakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan aneka kecurigaan selama ini dapat dihindari.<sup>44</sup>

#### E. Penutup

Perluasan pendidikan melalui kebijakan politik etis dimaksudkan untuk memenuhi tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan birokrasi pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan ini cenderung bersifat diskriminasi, seperti terlihat dari kelas sosial para siswanya, jenis kurikulum, dan aneka sekolah yang didirikan, apalagi dikelola oleh lembaga pendidikan misi dan zending.

Pendirian Madrasah Mambaul 'Ulum dalam jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah adalah untuk memberi kesempatan kepada anak-anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan agama Islam. Jenjang Ibtidaiyah didirikan di tujuh kabupaten Klaten, Boyolali, Kartosuro, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Surakarta. Pada jenjang Tsanawiyah dan Aliyah kegiatan pendidikan hanya dilaksanakan di Surakarta. Perluasan pendidikan agama Islam dapat diasumsikan sebagai Islamisasi untuk menekan laju Kristenisasi di daerah Kasunanan, walau perluasan pendidikan di berbagai kabupaten ini memiliki beragam sumbangan untuk membangkitkan *revivalisme* dan solidaritas Islam yang berwujud terhadap tumbuhnya nasionalisme. Semangat *revivalisme* dan solidaritas Islam pada dekade pertama abad XX telah mendorong kesadaran sekelompok masyarakat pengusaha batik untuk mendirikan SI sebagai organisasi sosial politik di Surakarta. Sunan dan keluarga kraton dijadikan figur dalam menggalang massa, sehingga organisasi SI mendapat tempat dan hidup subur di pedesaan Surakarta.

<sup>44</sup>Hans van Miert (2003), "Een koel hoofd en een warm hart: Nationalisme, Javanisme en Jeugdweging in Nederlands-Indie, 1918-1930", terj. *Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-1930*, Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan KITLV, pp. 262-263.

Lintasan ideologi sosialis juga berkembang dalam pusaran budaya kraton. Ini memberi petunjuk adanya perubahan dalam kehidupan politik di Kasunanan Surakarta. Fenomena perubahan itu bernuansa semakin berkembangnya pluralisme politik di Surakarta, sehingga menjadi salah satu bingkai perpolitikan dalam sejarah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud (2004), *Intelektual Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.
- Anderson, Benedict (1987), *Imagine Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
- Asnawi Hadisiswaja (1939), *Soerakarta Adiningrat*, Surakarta: Poesaka Soerakarta dan Islam Raja Solo.
- Basit Adnan H.A. (1982), *Sejarah Masjid Agung dan Gamelan Sekaten di Surakarta*, Surakarta: Mardikuntaka.
- Baudet, H. & I.J. Brugmans (1987), "Balans van Beleid, Terugblik op de Laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie", terj. Amir Sutaarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: YOI.
- Daod Joesoef (2004), "Sangkan Paraning Dumadi", dalam *Kompas*, 14 Agustus
- Darsiti Soeratman (2000), *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Houben, Vincent J.H. (2002), "Kraton and Kumpeni Surakarta and Yogyakarta 1830-1870" terj. E. Setyawati Alkhatab, *Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Ilham B. Saenong (2002), *Hermeneutika Pembebasan*, Jakarta: Teraju.
- Karkono Partokusumo (1983), *Zaman Edan: Pembahasan Serat Kalatida Ranggawarsita*, Yogyakarta: Proyek Javanologi.
- Kuntowijoyo (2004), *Raja, Priyayi, dan Kawula*, Yogyakarta: Ombak.
- Larson, George D. (1990), "Prelude to Revolution, Palace and Politics In Surakarta, 1912-1942" terj. A.B. Lopian, *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mangkunegaran (1929), *Narpawandana*.
- (1999), *Pawarti lan Kabar Panprentahan Surakarta*, alih aksara Sudarsi
- Margana, S. (2004), *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miert, Hans van (2003), "Een koel hoofd en een warm hart: Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indie, 1918-1930", terj. Sudewo Satiman *Dengan Semangat Berkeobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-1930*, Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan KITLV.

- Nurcholish Madjid (1998), *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.
- Ong Hok Ham (2002), *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta: Buku Kompas.
- Pakne Puri (2004), "PB X, Jaman Pergerakan Rakyat", dalam *Penyinar Semangat*, No. 39, 2004.
- Paku Buwana IX (1979), *Serat Wira Iswara*, Alih Aksara Hardjana H.P. Jakarta: Depdikbud.
- Penders, Christian Lambert Maria (1977), *Indonesia, Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942*, St. Lucia, Queensland: University of Queensland Press.
- Quraish Shihab (2003), *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan
- Radya Pustaka (1905), *Bebukanipun Adeging Pamulangan ing Kagungan Dalem Masjid Ageng*, Surakarta: Radya Pustaka.
- Ricklefs, Merle C. (1998), "Islamising Java: The Long Shadow of Sultan Agung", dalam *Archipel*, Volume I, No. 56
- (2002), "Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792". terj. Hartono H. & E. Setyawati Alkhatib, *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*, Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Sarlito W. Sarwono (2005), "Kecerdasan Emosi Politisi", dalam *Kompas*, Sabtu, 7 Mei
- Sartono Kartodirdjo (1978), *Protest Movement in Rural Java*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Shiraishi, Takashi (1997), "An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926", terj. Hilmar Farid, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Grafitti Pers.
- Staatsblad Nederlandsch-Indie No. 125, 1893.
- Staatsblad Nederlandsch-Indie No. 550, 1905
- Zamakhsyari Dhofier (1982), *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.